

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Poskolonial dan Sastra Poskolonial

Sebelum pembahasan mengenai konsep teori poskolonial, akan dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai poskolonial. Secara etimologis kata poskolonial berasal dari kata ‘pos’ dan ‘kolonial’, sedangkan kata kolonial itu berasal dari bahasa Romawi *colonial* yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. Loomba (2003:27) mendefinisikan kolonialisme adalah sebagai sebuah bentuk pengambilan secara paksa, berupa tanah dan perekonomian yang dilakukan oleh bangsa penjajah, suatu restrukturasi perekonomian nonkapitalis untuk mendorong kapitalisme penjajahan.

Secara umum poskolonial merupakan kajian karya sastra (dan bidang lain) yang berkaitan dengan praktik kolonialisme dan imperialisme, baik secara sinkronik, maupun diakronik (Nurhadi, 2007: 50). Ciri khas poskolonial adalah berbagai pembicaraan yang berkaitan dengan kolonialisme, khususnya *orientalisme*, sebab termasuk juga di dalamnya adalah narasi besar dari poskolonial, yaitu *orientalisme*. Pada konteks sastra Indonesia, dapat digunakan untuk memahami karya sastra era Balai Pustaka (1920-1952) pada masa kolonial Belanda, dan karya-karya yang menggambarkan adanya relasi pribumi dan penjajah kolonial.

Beberapa hal mengenai karya dan teori sastra poskolonial, bersinggungan dengan gerakan-gerakan yang muncul di Eropa. Seperti posmodernisme, poststrukturalisme, kritik ideologi Marxis kontemporer, dan kritik feminis. Ashcroft

(1989:237) mengemukakan bahwa, teori-teori tersebut menawarkan sejumlah perspektif alternatif yang menjelaskan beberapa prolem krusial yang ditemukan pada teks-teks poskolonial. Sebagai varian dari postrukturalisme, konsep dasar kajian poskolonial hampir sama dengan postrukturalisme, seperti penolakan terhadap narasi besar, oposisi biner, dekontruksi terhadap subjek tunggal, dan proses sejarah yang terjadi secara monolitik (Hägerdal, 2012:03).

Kajian atau teori poskolonial berusaha untuk membongkar fenomena dan segala bentuk struktur yang terjadi di era kolonial, bahkan lebih dari pada itu, kajian poskolonial juga menganalisis dampak dimasa sekarang, yang diakibatkan dari kolonisasi baik bangsa Eropa, maupun bangsa Jepang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucoult (2002:104-106) bahwa salah satu cara untuk membongkar struktur ideologi adalah melalui arkeologi dan genealogi, yaitu, *pertama*, melalui penggalian masa lalu. *Kedua*, ialah dengan mencoba menemukan kontinuitas dan diskontinuitas hiastoris dari sebuah objek.

Kajian poskolonial (Nurhadi, 2007: 49) berusaha membongkar selubung praktik kolonialisme di balik sejumlah karya sastra sebagai superstruktur dari suatu kekuasaan: kekuasaan kolonial. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasaan atau sebaliknya sebagai konter hegemoni. Sebagai akibat luasnya wilayah kajian poskolonialisme, maka teori poskolonialisme Indonesia, Ratna (2008: 96) melibatkan tiga pengertian, sebagai berikut.

Pertama, Abad berakhirnya imperium kolonial di seluruh dunia. *Kedua*, Segala tulisan yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kolonial sejak abad ke-17 hingga sekarang. *Ketiga*, Segala tulisan yang ada kaitannya dengan

paradigma superioritas Barat terhadap inferioritas Timur, baik sebagai orientalisme maupun imperialisme dan kolonialisme

Pengertian pertama memiliki jangkauan yang paling sempit, poskolonialisme semata-mata sebagai wakil masa pascakolonial. Di Indonesia mulai pertengahan abad ke-20, sejak proklamasi 1945 hingga sekarang. Pengertian yang kedua lebih luas, meliputi segala tulisan sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia untuk pertama kali, diawali dengan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol awal abad ke-16 disusul oleh Belanda awal abad ke-17. Pengertian yang ketiga paling luas, dimulai sebelum kehadiran bangsa Barat secara fisik di Indonesia, tetapi telah memiliki citra tertentu terhadap bangsa Timur.

Studi postkolonial termasuk relatif baru. Banyak pendapat tentang teori postkolonial, sehingga cukup sulit untuk menentukan secara pasti teori poskolonialisme lahir. Ratna (2008 :84) menyatakan bahwa proyek poskolonial pertama kali dikemukakan oleh Frantz Fanon dalam bukunya yang berjudul *Black Skin, White Masks* dan *The Wretched of The Earth* (New York, 1967). Fanon adalah seorang psikiater yang mengembangkan analisis secara cermat mengenai dampak psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan oleh kolonisasi.

Pada masa kolonial, secara keseluruhan kehidupan sosial dibagi menjadi dua kekuasaan, kekuasaan kolonial, dan kekuasaan mistis penduduk pribumi (Maimunah, 2014:335). Fanon menyimpulkan bahwa melalui dikotomi kolonial, yaitu kelompok penjajah dan terjajah, wacana orientalisme telah melahirkan alienasi dan marginalisasi psikologis sangat dahsyat. Di dunia Anglo Amerika poskolonialisme dirintis oleh Edward Said pertama kali dikemukakan melalui

bukunya *Orientalism* (1978). Tesis utamanya adalah hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan sebagaimana diintroduksi oleh Foucault melalui buku *Arkeologi Pengetahuan*.

Teori Poskolonial berkembang pesat setelah era Said sebagai pemikir kajian poskolonial. Teori poskolonial masuk ke berbagai bidang pengetahuan. Ia menjadi sarana untuk mengkritik dan membongkar hegemoni Barat atas Timur. Seperti yang diungkapkan Said dalam *Orientalisme* (Nurhadi, 2007: 50) ada sejumlah karya sastra dalam dunia Barat yang turut memperkuat hegemoni Barat dalam memandang Timur (*Orient*).

Teori poskolonial dibangun atas dasar peristiwa sejarah terdahulu, pengalaman pahit bangsa Indonesia selama tiga setengah abad, khususnya di bawah kolonialisme imperium Belanda. Kemerdekaan yang diperoleh pertengahan abad ke-20, namun secara *de facto* belum berarti bahwa bangsa Indonesia telah bebas secara seutuhnya. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan misalnya dalam kaitannya dengan ekonomi, sosial, dan politik, maupun mentalitas yang perlu dipecahkan.

Ratna (2008: 81) Teori poskolonial memiliki arti penting, dianggap mampu untuk mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung di balik kenyataan yang pernah terjadi, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, Secara definitif, poskolonialisme menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Poskolonialisme sangat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka sekitar setengah

abad. Jadi, masih sangat banyak permasalahan yang perlu dipecahkan, bahkan masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia.

Kedua, Poskolonialisme memiliki erat kaitannya dengan nasionalisme, sedangkan kita sendiri sedang menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Teori poskolonialisme dianggap dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing pribadi agar selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi.

Ketiga, Sebagai teori baru dan varian poststrukturalisme, postkolonialisme memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan. *Keempat*, Poskolonialisme membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan psike.

Kelima, Poskolonialisme bukan semata-mata teori melainkan suatu kesadaran sendiri, bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme dan berbagai bentuk hegemoni lainnya, baik material maupun spiritual, baik yang berasal dari bangsa asing maupun bangsa sendiri.

Teori poskolonial banyak dibicarakan, sekaligus mempunyai tempat dikalangan ilmuwan satu dasawarsa sesudah terbitnya buku Frantz Fanon (1960-an), yaitu dengan adanya temuan Edward Said mengenai pemahaman baru terhadap orientalisme. Artinya, lahirnya teori poskolonialisme diawali dengan pemahaman ulang tentang orientalisme. Meskipun demikian, dalam analisis

orientalisme dengan poskolonial seolah-olah merupakan dua kutub yang bertentangan, dua ideologi dengan muatan yang berbeda, tetapi selalu hadir secara bersama-sama, sebagai oposisi biner.

Orientalisme adalah pemahaman, ilmu pengetahuan, teori-teori Barat yang sarat dengan ideologi mengenai inferior bangsa Timur. Di pihak lain poskolonial adalah teori baru, yang menganggap bahwa cara-cara yang digunakan untuk membongkar hegemoni pengetahuan Barat mengenai dunia Timur itu sendiri.

Teori poskolonial dan sastra poskolonial memiliki irisan yang sangat kuat. Keduanya lahir dari keadaan sosial masyarakat yang mengalami penjajahan baik dari segi waktu maupun unsur penceritaan karya sastra yang menyajikan aspek kolonialisme. Poskolonial sebagai teori lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Bidang kajiannya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan sosial dan budaya nasional.

Sastra poskolonial secara umum memiliki dua aspek, yaitu sastra yang lahir era kolonial (Balai Pustaka) dan sastra yang lahir di era pascakolonial, namun memiliki unsur kisah dan cerita yang berkaitan dengan tema kolonialisme dan penjajahan bangsa eropa. Secara umum Poskolonial adalah istilah yang mengacu pada waktu setelah terjadinya kolonial. Poskolonial tidak hanya mengacu pada kajian sastra setelah era penjajahan, atau kemerdekaan tetapi mencakup lebih luas mengacu pada segala hal yang terkait dengan kolonialisme abad ke-21 hanya menyisakan Amerika sebagai bangsa penjajah baru.

Nurhadi (2007:50) mengemukakan bahwa Tema-tema yang perlu dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan di antaranya:

politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa dan sastra sekaligus praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang lain. Meskipun demikian, keberagaman permasalahan di atas dipersatukan oleh tema yang sama yaitu kolonialisme.

Sejumlah karya seni telah melegitimasi praktik kolonialisme bangsa Barat atas kebiadaban Timur. Penjajahan adalah sesuatu yang alamiah, bahkan semacam tugas bagi Barat untuk memberadabkan bangsa Timur. Kajian Said ini berangkat dari teori hegemoni Gramscian dan teori diskursus Foucaultian. Dalam pengertian intelektual Prancis, diskursus (yang sering diindonesiakan menjadi wacana) adalah cara menghasilkan pengetahuan ditambah praktik sosialnya, bentuk subjektivitas dari pengetahuan, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan pengetahuan di antara semua aspek ini.

Orientalisme adalah buah dari kelanjutan dari oposisi biner antara Barat dan Timur yang berjaln dengan kepentingan kekuasaan. Eksistensi Timur bukan hanya sebagai wilayah secara geografis dan lawan Barat dalam struktur bahasa. Timur adalah sesuatu yang *distreotipekan*, kalau dalam bahasa Said, “ditimurkan”. “Pen-timur-an” bukan hanya ada dalam imajinasi, tetapi juga kebutuhan untuk dominasi, hegemoni yang berakhir eksploitasi. (Rohman, 2009: 15).

Sebagai sebuah negara koloni Hindia-Belanda dikenang secara khusus oleh bangsa penjajah, khususnya bangsa Belanda, baik totok maupun keturunan yang pernah tinggal di wilayah itu. Mayoritas bangsa Belanda yang pulang kembali

kenegerinya sebelum pendudukan Jepang pada umumnya mengenang Hindia-Belanda sebagai sebuah negeri elok nan cantik (*mooi Indie*) tempat mereka mendapatkan kejayaan, kemakmuran, dan berbagai kemudahan yang tidak ditemukan dinegeri mereka Eropa (Sudibyo, 2017:220).

Teori poskolonial dan sastra poskolonial memiliki irisan yang sangat kuat. Keduanya lahir dari keadaan sosial masyarakat yang mengalami penjajahan baik dari segi waktu maupun unsur penceritaan karya sastra yang menyajikan aspek kolonialisme. Poskolonial sebagai teori lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Bidang kajiannya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan sosial dan budaya nasional. Sedangkan sastra poskolonial secara umum memiliki dua aspek, yaitu sastra yang lahir era kolonial (balai pustaka) dan sastra yang lahir di era pascakolonial, namun memiliki unsur kisah dan cerita yang berkaitan dengan tema tema kolonialisme dan penjajahan bangsa eropa.

Poskolonial adalah istilah yang mengacu pada waktu setelah terjadinya kolonial. Poskolonial tidak hanya mengacu pada kajian sastra setelah era penjajahan, atau kemerdekaan tetapi mencakup lebih luas mengacu pada segala hal yang terkait dengan kolonialisme abad ke-21 hanya menyisakan Amerika sebagai bangsa penjajah baru. Kata *pos* (*post*) sebaiknya diartikan sebagai “melampaui” sehingga kajian poskolonial adalah kajian yang melampaui kolonialisme, artinya bisa berupa pasca atau permasalahan lain yang masih terkait (Nurhadi, 2007: 49).

Lebih lanjut Nurhadi (2007) mengemukakan bahwa Tema-tema yang perlu dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan di antaranya: politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa dan sastra sekaligus praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang lain. Meskipun demikian, keberagaman permasalahan di atas dipersatukan oleh tema yang sama yaitu kolonialisme.

Foucault memahami sejarah dengan bergerak mundur, mulai dari masa kini ke masa lalu, kemudian kembali ke masa kini dalam rangka mempertahankan diskontinuitas. Bryson, (2003:233) mengemukakan bahwa tidak ada kesepakatan umum mengenai arti dari istilah 'postrukturalisme'. Teori poskolonial dibangun atas dasar peristiwa sejarah terdahulu, pengalaman pahit bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad, khususnya di bawah kolonialisme Belanda (Hägerdal, 2012:5).

Kemerdekaan yang diperoleh pada pertengahan abad ke-20 belum berarti membawa bangsa Indonesia telah bebas secara keseluruhan, masih banyak masalah, baik dalam kaitannya dengan ekonomi, sosial, politik, maupun mentalitas, yang perlu dipecahkan, oleh sebab itu, teori poskolonial memiliki arti penting yang dianggap mampu untuk mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung dibalik kenyataan yang pernah terjadi pada era kolonialisme.

Loomba, (2003:26) mengemukakan bahwa warisan kolonial sampai sekarang masih berlanjut, dalam proses mengupayakan agar suara mereka itu

didengar telah memertanyakan dan merevisi definisi-definisi dominan tentang ras, budaya, bahasa, dan kelas. Berdasarkan pendapat kedua tokoh di atas dapat dikatakan bahwa dekolonisasi masih berlangsung sampai era saat ini. Penjajahan mungkin secara fisik telah terhenti, namun di sisi lain masih menyisakan bekas yang tak bisa dilupakan oleh masyarakat, seperti merepresi masyarakat bekas jajahan mewarisi mental yang serupa dengan penjajah. Pada era saat ini kemudian proses dekolonisasi lebih beragam bentuknya, salah satunya pada hal ekonomi, budaya, bahasa dan politik.

Kesusastraan poskolonial diinformasikan oleh usaha-usaha kritis dewasa ini untuk menerima dalil, utamanya sebagai suatu konteks yang secara tekstual, atau suatu pertempuran bibliografis antara karya-karya yang opratif dan subversif (Gandhi 1998:74). Teks-teks itu kemudian diimplementasikan dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Bertolak dari kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa antara sastra dan poskolonialisme menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, teks-teks sastra poskolonial yang ditampilkan mencerminkan terhadap ideologi masyarakat, baik yang bersifat dominan maupun marginal. Loomba, (1998:92) berpendapat bahwa telah terjadi kompleksitas dan ketegangan-ketegangan antara teks sastra dan masyarakat, disertai dengan adanya kemungkinan nuansa-nuansa yang bercorak budaya kolonial, dan bukti-bukti sejarah masyarakat yang mengarah pada masyarakat bekas jajahan.

Gambaran teks sastra pada masa kolonial bersifat naratif yang bercirikan tentang persaingan, ketidakadilan dan perlawanan. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka semua teks sastra kolonial dilihat sebagai suatu teks sastra yang bersifat represif, sedangkan di pihak lain semua teks/naskah di era poskolonial dinyatakan sebagai kekuatan *subversif* (Gandhi, 1998:195).

Ashcroft (1989:02) berpendapat bahwa secara umum poskolonial mencakup semua budaya yang dipengaruhi oleh aktifitas penjajahan dan aktifitas yang masih berlangsung di era saat ini, oleh sebab itu, ada kesinambungan peristiwa sepanjang proses sejarah yang diprakarsai oleh para penjajah. Istilah poskolonial ini juga merupakan kritik budaya yang muncul beberapa tahun kemarin dan masih berlangsung sampai sekarang. Seperti yang berkembang selama beberapa abad terakhir telah menjadi unsur paradigmatis untuk beberapa literatur yang membahas tentang poskolonial, salah satunya adalah literatur yang berkaitan dengan sastra poskolonial.

Ashcroft (1989:11-12) juga mengemukakan bahwa gagasan munculnya teori poskolonial diakibatkan dari ketidakmampuan teori Barat yang cukup untuk berurusan dengan kompleksitas, dan beragam sumber budaya yang berasal dari teks-teks poskolonial. Teori-teori Barat sendiri muncul dari tradisi budaya tertentu yang disembunyikan oleh gagasan palsu atas 'universalitas'. Teori gaya dan genre, berasumsi tentang fitur universal dari bahasa, epistemologi dan sistem nilai, semuanya dipertanyakan secara radikal oleh praktik penulisan poskolonial.

Teori poskolonial telah berkembang dari kebutuhan untuk mengatasi praktik yang berbeda ini. Gagasan tentang kaum pribumi telah dikembangkan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai tradisi budaya, serta

keinginan untuk menggambarkan secara komparatif fitur-fitur yang dimiliki bersama di antara tradisi-tradisi itu. Pada tataran ilmu-ilmu sosial, pengetahuan merupakan bagian dari tatan sistem sosial yang berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan sosial termasuk juga di dalamnya ialah sistem budaya (Huddart, 2008:11).

Kaitannya dengan teori poskolonial, bersama dengan bentuk lain dari teori sastra dan budaya, khususnya dalam hal wacana akademis yang bisa diterapkan. Teori poskolonial secara umum berupaya untuk membongkar segala aktifitas kolonial yang terjadi di negara-negara yang terkena dampak kolonialisme, baik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa, maupun kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah Jepang.

Prasad (2003:5) mengatakan bahwa secara khusus memang ada sesuatu yang baru dan unik tentang kolonialisme Barat modern. Salah satu perbedaan penting antara kolonialisme Barat modern dan imperium-imperium sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, ialah tidak hanya mengekstraksi kekayaan dan upeti dari rakyat serta wilayah yang ditaklukkannya, tetapi ia juga menghubungkan antara Barat dan koloninya dalam struktur kompleks di ranah pertukaran dan industrialisasi yang tidak merata, sehingga membuat koloni-koloni itu secara ekonomi bergantung pada negara-negara koloni Barat.

Bassnett (1999:19) mengemukakan bahwa dalam analisis teks sastra muncul dari orang-orang yang telah terjajah atau tertekan, serta mengundang metafora yang berkaitan dengan kritik terhadap teks-teks poskolonial, misalnya, suara-suara yang

dibungkam, margin, pusat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran senjata. Kecendrungan adanya metafora tersebut menunjukkan kajian sastra poskolonial melihatnya sebagai fenomena sastra baru yang jarang diketahui bagaimana hubungan antara sastra dan kajian poskolonial dapat berkombinasi secara langsung dalam objek kajiannya.

Kritik dan teori sastra poskolonial sama-sama terdiri dari berbagai praktik yang dilakkan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, baik di banyak lokasi kelembagaan nasional, maupun yang berbeda di seluruh dunia (Gilbert 1997:05). Sebelumnya banyak hal yang mendahului periode ketika istilah 'poskolonial' mulai mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, sejak saat itu diklaim secara retorik dan bersifat kontinyu, atau berdekatan dengan apa yang sekarang biasanya diidentifikasi sebagai metode analisis dalam aspek budaya poskolonial. Siapa pun yang memiliki keberanian menulis sejarah tentang praktik-praktik ini mungkin harus memulai paling tidak pada awal abad ini dengan karya tokoh yang berbeda dengan pemikir barat atau Eropa, salah satunya yang paling sering di kemukakan adalah konsep kemajuan dan ketertinggalan antara Barat dan Timur.

Bukti-bukti peradaban yang telah dicapai oleh bangsa Timur tidak mampu membawa bangsa Timur sejajar dengan dengan bangsa Barat (Pillai, 2008:06). Timur juga tidak mampu mengubah persepsi masyarakat yang sudah tersebar banyak berabad-abad lamanya. Ketidakmampuan bukan hanya hasil dari kebudayaan, melainkan mitos yang sulit diubah dan perbedaan yang tertanam secara kultural, Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan sejarah poskolonial

antara objek yang dianalisis dengan teori itu sendiri sebagai alat analisis, maka perlu ada kecocokan, atau kesamaan objek untuk bisa menganalisisnya secara tajam.

Konteks jaringan institusional dari praktik-praktik kritis literer, serta nilai-nilai yang menopang munculnya teori poskolonial dalam pandangan Edward Said dalam bukunya yang berjudul *Orientalisme* perlu ditempatkan. Said (1978:78) menganggap pada awalnya berasal terutama dari mediasinya tentang metode kritis yang terkait dengan beberapa jenis teori tinggi Perancis ke dalam dunia akademik Anglo-Amerika pada tahun 1970-an.

Orientalisme memberikan salah satu contoh pertama dari aplikasi berkelanjutan dari mode analisis seperti itu terhadap sejarah kebudayaan, antropologi dan tradisi tekstual. Lebih khusus lagi, *Orientalisme* mengadaptasi elemen-elemen dari teori baru ini (yang dalam beberapa hal memperkuat, dan juga menantang, tradisi Marxis yang lebih tua) untuk mempelajari hubungan antara budaya Barat dan imperialisme, untuk menyatakan bahwa semua sistem dideskripsi budaya Barat adalah terkontaminasi dengan apa yang digambarkan sebagai politik, pertimbangan, posisi, dan strategi kekuasaan.

Masalah berkaitan dengan penjajah, dalam pengertian secara fisik dapat ditinggalkan sebab secara formal mereka sudah tidak ada, bahkan demikian penjajahan berakhir secara formal juga kita membentuk suatu hubungan baru, seperti hubungan diplomatik (Gilbert,1997:33). Sejak masa penjajahan sudah banyak bangsa Indonesia yang bersekolah ke negeri Belanda. Bahkan didirikan

suatu lembaga-lembaga khusus dalam rangka kerja sama Indonesia-Belanda, seperti *Indonesian Linguistics Development Project (ILDLP)*.

Masalah yang timbul kemudian yang diangkat dalam teori poskolonialisme adalah segala sesuatu yang ditinggalkannya. Jelas waktu tiga setengah abad merupakan waktu yang tidak singkat. Mengacu pada usia manusia yang rata-rata 70 tahun, maka kita dijajah baik secara fisik maupun psikologis selama lima generasi. Masa penduduk Jepang yang hanya berlangsung kurang lebih tiga setengah tahun, ternyata meninggalkan bekas sangat mendalam di hati bangsa Indonesia, maka dapat dibayangkan penjajahan yang berlangsung selama sepuluh kali lipat meliputi berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan. Peninggalan-peninggalan inilah yang harus dipecahkan oleh proyek poskolonial, khususnya sebagaimana diintroduksi oleh teorinya Edward Said dalam buku *Orientalisme*.

2. Kajian Subaltern

Martono (2011:68) mengemukakan bahwa Spivak memfokuskan permasalahan poskolonial pada subaltern. Istilah *subaltern* memiliki konotasi yang cukup luas, karena secara terminologis, subaltern pada dasarnya merujuk pada perwira junior dalam konteks militer Inggris, yang secara harfiah berarti “bawahan”. Selain itu, kata ini juga sering digunakan untuk menggambarkan petugas yang berpangkat rendah atau di bawah pangkat kapten. Sementara itu, dalam kajian teori kritis dan poskolonial subaltern diartikan sebagai masyarakat kelas rendahan.

Secara umum istilah subaltern merujuk pada populasi yang secara sosial, politik, dan geografis yang berada di luar struktur kekuatan hegemonik bangsa

kolonial. Istilah ini sendiri dipromosikan pertama kali oleh Antonio Gramsci, terutama melalui karyanya mengenai *hegemoni kultural*, yang mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial. Berdasarkan konotasi negatif tersebut, Spivak mengembangkan bahwa subaltern bukan hanya kata berkelas yang ditunjukkan bagi kelas yang tertindas atau bagi kelompok *the Other*.

Istilah subaltern bagi Spivak, merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses. Istilah tersebut menjadi semacam ruang perbedaan antara yang berkuasa dan yang tidak memiliki kuasa. Secara implisit, Spivak (1998: 24) mempertanyakan keterlibatan para akademisi dengan *the Other*. Baginya, agar terbukti keterlibatan yang otentik dengan subaltern, para akademisi harus menghapus dirinya sebagai sosok yang ahli di tengah hubungan sosial biner, antara kita (*us*) dan mereka (*them*), pusat dan pinggiran, dan segala bentuk oposisi biner lainnya.

Pada dasarnya, para akademisi selalu ingin tahu tentang pengalaman subaltern dari kolonialisme, namun mereka tidak ingin berada di tengah pengalaman dominasi penjajahan. Tentu ada semacam jarak yang memisahkan para akademisi dengan subaltern. Jarak tersebut menjelaskan bahwa kebenaran subaltern merupakan kebenaran yang berasal dari para ahli atau akademisi. Subjek yang tersubordinasi atau subaltern hanya menyerahkan pengetahuan tentang kolonialisme untuk dimanfaatkan oleh para akademisi, terutama para akademisi Barat.

Subaltern adalah istilah untuk orang-orang yang tertindas yang diciptakan oleh Antonio Gramsci yang berarti "inferior", subjek yang didominasi, atau lebih akrab dengan mereka yang inferior (Gandhi, 2006: 1). Subaltern juga didefinisikan sebagai "mereka bukan elit", dan elit adalah "kelompok dominan baik orang luar maupun penduduk asli" (Guha, 1982: 60).

Kelas subaltern merujuk secara mendasar dalam kata-kata Gramsci kepada setiap orang atau kelompok "peringkat rendah" dalam masyarakat tertentu yang menderita di bawah dominasi hegemonik kelas elit yang berkuasa yang menyangkal hak-hak dasar partisipasi dalam pembuatan sejarah dan budaya lokal sebagai aktif. individu dari bangsa yang sama. Mengacu pada definisi tersebut, Subaltern adalah mereka yang tidak dapat menyampaikan aspirasi dan suaranya karena ada tekanan dari atasan (Megawati, 2017:112).

Megawati (2017:115) berpandangan bahwa ada dua tipe masyarakat yang berbeda, misalnya AS dan India, dibentuk oleh struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik penindasan hegemonik yang sebanding dengan mendefinisikan dan membatasi identitas subaltern dalam masyarakat masing-masing. Misalnya suprastruktur rasial Amerika dan kasta di India memberi informasi, mengubah bentuk, dan memperumit identitas yang terpinggirkan di sepanjang garis gender, kelas, dan struktur keluarga.

Gagasan tentang subaltern pertama kali dirujuk oleh seorang aktivis politik Marxis Italia Antonio Gramsci dalam artikelnya "Notes on Italian History" yang muncul sebagai bagian dari bukunya yang paling terkenal, Buku Catatan Tahanan

yang ditulis antara tahun 1929 dan 1935. Subaltern, yang berarti 'lebih rendah' adalah istilah yang diadopsi oleh Antonio Gramsci untuk merujuk pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tunduk pada hegemoni kelas penguasa. Kelas subaltern dapat mencakup petani, pekerja, dan kelompok lain yang menolak akses ke kekuatan 'hegemonik' elit. Kelas subaltern, menurut definisi, tidak bersatu dan tidak dapat bersatu sampai mereka dapat menjadi Negara, sejarah mereka, oleh karena itu, terkait dengan masyarakat sipil, dan dengan demikian dengan sejarah Negara dan kelompok Negara. Misalnya dalam Catatan tentang sejarah Italia milik Gramsci menjabarkan rencana enam poin untuk mempelajari sejarah kelas subaltern yang mencakup:

Pertama, pembentukan objektif kelompok sosial subaltern, oleh perkembangan dan transformasi yang terjadi di bidang produksi ekonomi; difusi kuantitatif mereka dan asal-usulnya dalam kelompok sosial yang sudah ada sebelumnya, yang mentalitas, ideologinya, dan tujuan mereka lestarian untuk sementara waktu, *Kedua*, afiliasi aktif atau pasif mereka dengan formasi politik yang dominan, upaya mereka untuk memengaruhi program-program formasi ini untuk mengajukan klaim mereka sendiri, dan konsekuensi dari upaya ini dalam menentukan proses dekomposisi, renovasi atau pembentukan baru,

Ketiga, kelahiran partai-partai baru dari kelompok-kelompok dominan, yang dimaksudkan untuk melestarikan persetujuan dari kelompok-kelompok subalternus dan untuk mempertahankan kendali atas mereka, *Keempat*, formasi yang dihasilkan oleh kelompok subaltern itu sendiri, untuk mengajukan klaim-karakter yang terbatas dan parsial, *Kelima*, formasi baru yang menegaskan otonomi

kelompok subaltern, tetapi dalam kerangka lama, dan *Keenam*, formasi-formasi yang menegaskan otonomi integral, dll. Gramsci (1971: 52).

Gramsci telah mengklaim bahwa sejarah kelas subaltern sama rumitnya dengan sejarah kelas dominan, meskipun sejarah yang terakhir biasanya diterima sebagai sejarah 'resmi'. Baginya, sejarah kelompok sosial subaltern tentu terpecah-pecah dan episodik Gramsci (1988: 54), karena mereka selalu tunduk pada aktivitas kelompok penguasa, bahkan ketika mereka memberontak.

Jelas mereka kurang memiliki akses ke sarana yang dengannya mereka dapat mengendalikan perwakilan mereka sendiri, dan lebih sedikit akses ke lembaga budaya dan sosial. Hanya kemenangan yang permanen (yaitu-penyesuaian kelas revolusioner) yang dapat mematahkan pola subordinasi itu, dan bahkan itu tidak terjadi segera (Ashcroft, 2007: 212).

Gramsci pertama kali menggunakan konsep subaltern cukup jelas untuk diberikan interpretasi yang tidak masuk akal. Satu-satunya kelompok yang ada dalam pikiran Gramsci pada saat itu adalah kaum buruh dan tani yang ditindas dan didiskriminasi oleh pemimpin Partai Fasis Nasional, Benito Mussolini dan agennya. Gramsci menjadi tertarik pada studi tentang kelas-kelas kesadaran dan budaya subaltern sebagai salah satu cara yang mungkin untuk membuat suara mereka didengar daripada mengandalkan narasi sejarah negara yang pada akhirnya adalah sejarah kelas penguasa dan kelas dominan Louai (2011: 2).

Dalam pandangan Spivak Gandhi (2006: 2) studi sastra kolonial dapat dikaitkan dengan masalah studi subaltern. Itu adalah studi masyarakat yang

tertekan, harus mengambil inisiatif, dan memegang tindakan atas suara mereka dibungkam. Pemahaman seperti ini, secara sadar atau tidak banyak mewarnai dunia sastra Anda, tidak sedikit karya sastra di era kolonial yang mengungkapkan masalah subaltern. Spivak melanjutkan untuk menguraikan masalah-masalah dari kategori subaltern dengan melihat situasi subyek gender dan perempuan India pada khususnya, untuk 'baik sebagai objek historiografi kolonialis dan sebagai subjek pemberontakan, ideologis

Konstruksi gender membuat laki-laki tetap dominan, karena dalam konteks produksi kolonial, subaltern tidak memiliki sejarah dan tidak dapat berbicara, subaltern sebagai perempuan bahkan lebih dalam bayangan' Spivak (1985: 27). Istilah ini telah diadaptasi untuk studi pascakolonial dari karya kelompok sejarawan Studi Subaltern, yang bertujuan untuk mempromosikan diskusi sistematis tema subaltern dalam Studi Asia Selatan.

Istilah *Subaltern Studies* digunakan atribut umum subordinasi dalam masyarakat Asia Selatan apakah ini dinyatakan dalam kelas, kasta, usia, jenis kelamin dan jabatan atau dengan cara lain 'Guha (1988: vii). Kelompok yang dibentuk oleh Ranajit Guha, dan awalnya termasuk Shahid Amin, David Arnold, Partha Chatterjee, David Hardiman dan Gyan Pandey telah menghasilkan lima volume Studi Subaltern esai yang berkaitan dengan sejarah, politik, ekonomi dan sosiologi subalternitas 'serta singkatnya, ideologi dan sistem kepercayaan, budaya yang menginformasikan kondisi itu, tujuan dari proyek Subaltern Studies adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang diciptakan dalam karya akademik

dengan kecenderungan untuk fokus pada elite dan budaya elite dalam historiografi Asia Selatan

Esainya yang berjudul *Can the Subaltern speak?*, Spivak memertanyakan gagasan kolonial (Barat) sebagai ‘Subjek’ dan memberikan contoh batas kemampuan wacana Barat, bahkan wacana poskolonial sendiri berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Artikel ini menunjukkan bahwa batasan-batasan ini dapat (sebagian) diatasi. terutama banyak komentar tentang Spivak berfokus pada bacaannya tentang Marx melalui prisma Derrida, kemudian atas dasar pendapatnya yang menyatakan bahwa ‘informan pribumi’ secara simultan diciptakan dan dihancurkan, keterlibatan Spivak selalu menyiratkan subjek liberal-independen yang secara aktif berbicara.

Mengingat batas-batas pemahaman yang tersirat oleh Spivak, pembacaan budaya berdasarkan asumsi bahwa semua tindakan menawarkan peran komunikatif, dan seseorang dapat memahami budaya dengan menerjemahkan berbagai perilaku budaya mereka (Maggio, 2007:02). Dampak subaltern telah menyebar melintasi disiplin sejarah, antropologi, sosiologi, studi sastra, gender dan budaya. Maggio (2007:08) mengemukakan bahwa mereka mengenal *the other* dan dapat menempatkannya dalam konteks narasi kaum tertindas. Para intelektual harus berusaha untuk mengungkap dan mengetahui wacana masyarakat lain tentang masyarakat. Faktanya, melalui tindakan pengetahuan dan kekerasan epistemik ini, esensi dari yang lain selalu merupakan penguat dari ancaman imperealisme.

Secara historis dan mitologis, sejak abad pertengahan hingga sekarang, dunia barat hampir dalam segala bidang dianggap memiliki superior terhadap dunia timur

(Lomba, 1998:75). Termasuk dalam hal yang berhubungan dengan wacana gender, seksualitas, dan identitas perempuan. Kekhawatiran mengenai isu gender, seksualitas, dan identitas perempuan era kolonial dalam menghadapi norma-norma penjajah yang dianggap mengecam hirarki gender, menjadi pengekan dan penghalang pencitraan mengenai perempuan Indonesia (Hatley, 2018:175).

Pillai (2008:06) mengatakan bahwa perempuan era kolonial pada dasarnya dibedakan oleh kebudayaan, bukan oleh hakikat. Seorang tidak dilahirkan “sebagai” perempuan, melainkan “menjadi” perempuan. Dampak yang ditimbulkan dari situasi tersebut terhadap perempuan adalah sifat perempuan, pengalaman, serta konstruksi sosial perempuan terkungkung dalam kekuasaan hegemonik bangsa penjajah. Menanggapi persoalan seperti itu, pendekatan kajian poskolonial paling dianggap relevan dalam menghadapi situasi serta dampak kolonialisme, oleh sebab itu, secara kusus dalam kajian-kajian poskolonial hal seperti itu disebut dengan istilah subaltern.

Kajian subaltern bagi Spivak (1998:163) menekankan perbedaan yang diidentifikasi, antara praktik dan teori yang diterapkan. Spivak dalam esainya yang berjudul “*Can the Subaltern Speak?*” Jelas mengelaborasi beberapa konteks lain dalam sistem-sistem representasional yang bersaing secara keras menggantikan figur subaltern yang didengarkan (Gandhi, 1998: vii).

Secara lebih luas Spivak merujuk subaltern kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses kekuasaan hegemonik seperti, perempuan, petani, buruh, dan orang miskin lainnya. Bagi Spivak, subaltern dalam kajian poskolonial, istilah

tersebut merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses perempuan menjadi semacam ruang pembedaan (Setiawan, 2018:02).

Spivak mencoba memasukkan variable jenis kelamin sebagai objek kajiannya, yaitu untuk melihat adanya hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dianalogikan dalam hubungan oposisi biner. Bagi Spivak studi mengenai gender dan feminisme menjadi isu krusial dalam studi poskolonial.

Loomba (1998:197) mengatakan bahwa perempuan sebagai wilayah yang bisa saling dipertukarkan. Subaltern yang dialami oleh perempuan bermakna ganda, terutama bidang kajiannya terhadap perempuan Hindia, dalam artian selain perempuan Hindia menerima budaya patriaki, perempuan Hindia juga mengalami kekerasan sebagai pribumi yang terjajah. Selaras dengan apa yang dikatakan Ashcroft (1989:178) mengemukakan bahwa patriarki dan kolonialisme dapat dilihat dari dominasi terhadap pihak yang disubordinasi.

Faruk (2007:09) mengemukakan ada dualisme sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Hindia. Masyarakat Hindia, hidup dalam sitem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tradisional mereka masing-masing, tapi dipihak lain mereka harus hidup dengan tataran kolonial yang berlaku bagi semua sektor. Sistem sosial kebudayaan juga menempatkan seorang perempuan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki. Perempuan mengalami pembatasan akses kebudayaan atau bahkan suara mereka tidak didengar walaupun mengalami suatu ketidakadilan gender.

Masalah utama subaltern tidak hanya mengenai kategori orang yang tertindas atau kelas pekerja yang tertindas, tetapi juga berkaitan dengan siapa saja yang suaranya terbatas oleh suatu akses yang mewakilinya (Setiawan, 2018:03). Misalnya, seorang pemimpin demonstrasi yang berkoar-koar mengenai hak asasi kelas pekerja atau juga perempuan, entah siapa pun yang berada di sana (orang kaya atau orang miskin), ketika suara mereka selalu terwakili dan mereka tidak memiliki kebebasan bersuara, mereka dapat dikategorikan sebagai subaltern.

Masalah pada kajian ini terletak pada penjajah yang ingin mempersepsikan diri mereka dengan cara mengkritik tradisi sati yang ada di India. Perspektif Spivak, bangsa Barat ingin mengambil persepsi dengan mendefinikan mereka sendiri lewat tradisi sati India. *If, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow* (Spivak, 1998:106).

Subaltern dalam pandangan Spivak, menempatkan kaum perempuan dalam berbagai konteks kolonial tidak memiliki bahasa konseptual untuk berbicara, karena tidak ada telinga dari kaum laki-laki kolonial maupun pribumi untuk mendengarkannya (Gandhi, 1998: vii). Persepektif ini secara literer menempatkan perempuan sebagai objek, dalam kasus ini juga menunjukkan perempuan tidak bisa merepresentasikan dirinya sendiri ataukah harus direpresentasikan oleh orang lain.

Kasus yang terjadi wacana ini menunjukkan bahwa, tidak ada posisi subjek di era kolonialisme yang memungkinkan kaum perempuan untuk mengartikulasikan diri mereka sebagai pribadi, sebab mereka ditakdirkan untuk “diam”. *The subaltern cannot speak, the female intellectual as intellectual has a*

circumscribed task which she must not disown with a flourish (Spivak, 1998:107).

Bias atau dampak yang ditimbulkan dari perlakuan penjajah terhadap subaltern perempuan di era poskolonial adalah mengenai peran perempuan dalam kehidupan publik dan politik.

Perempuan atau masyarakat bawah dipandang kurang memiliki akses yang kurang memadai terhadap sektor-sektor strategis yang disebabkan oleh konstruksi budaya kolonial yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pengertian subaltern sebagai kategori subordinasi secara umum. Kajian subaltern dalam memakai istilah tersebut ialah sebagai nama bagi atribut secara umum subordinasi dalam masyarakat Asia (Morton, 2008:158).

Kaitannya dengan sastra, subaltern yang ingin dimunculkan dalam teks-teks karya sastra juga tidak akan jauh dari fenomena di atas. Seperti yang dikatakan Maggio, (2007:07) bahwa Spivak ingin *mem-blow up* keterlibatan sastra dan elit intelektual, yang sering tampak tidak bersalah dalam ranah politik penindasan yang ada dalam karya sastra. Elite intelektual akademis Barat dan Sub-Barat berpura-pura tidak bercela di arena kolonialisme, dengan kata lain, pemikiran Barat "menyamar" sebagai sejarah yang tidak memihak, bahkan ketika kritikus berpendapat untuk menyentuh ketidaksadarannya. Pada dunia akademis, penjajah memosisikan diri sebagai bagian dari masalah, dan sekaligus juga bagian dari pemecahan.

Spivak, (1998:135) mengemukakan bahwa subjek subaltern atau masyarakat yang terkena subaltern tidak lah memungkinkan untuk menggali suara mereka atau

subjek-subjek yang tertindas lainnya. Loomba, (1998:293) mengatakan mereka tidak bisa mewakili dirinya sendiri, atau bahkan ketika mereka bersuara menjadi pertanyaan apakah suara mereka murni dari mereka, atau suara karena ketidakberdayaan mereka terhadap kolonialisme, ditambah lagi kolonialisme secara historis bertemu dengan budaya patriaki, isu-isu rasial, dan konsep tentang kemajuan selalu dibawa oleh penjajah kolonial untuk menguatkan legitimasi mereka di tanah jajahan.

Sejarawan kajian subaltern pada pokoknya peduli pada riset tentang praktik sosial dan politik, kelompok yang tidak mampu merepresentasikan diri mereka sendiri sebagai kelompok sosial dalam histografi kelas elite, dengan menekankan pada sejarah Asia, terutama dari sudut pandang subaltern, para ilmuwan akademis dibidang subaltern secara terus-menerus berjuang menentang elitisme, histografi nasionalis, borjuis, yang berakar pada ideologi kolonialisme (Morton, 2008: 160).

Meskipun begitu, kajian masyarakat subaltern lebih ingin menekankan pada pemberontakan destruktif yang dilakukan oleh kaum subaltern bersifat heterogen, tidak sistematis, dan sparatis dibandingkan dengan bentuk nasionalis elitis. oleh sebab itu, Manning (2016:03) mengemukakan pendekatan kesadaran sosial dan politik subaltern dengan pasti merupakan suatu yang tidak sepadan dengan pendekatan strukturalisnya terhadap pemberontakan kaum petani, perempuan dan buruh kelas bawah.

3. Dominsi Kolonial

Kawasan Asia Tenggara memainkan peran penting antara abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 dalam bidang perdagangan rempah-rempah. Perluasan

perniagaan global abad ke-16 yang panjang, sangat memengaruhinya sebagai sumber rempah-rempah yang dibutuhkan oleh dunia internasional dan kawasan maritim yang melintang di sepanjang rute perdagangan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling dipengaruhi oleh lonjakan aktivitas maritim Cina pada permulaan abad ke-15.

Kawasan ini merupakan sumber rempah-rempah, terutama lada yang menarik minat bangsa Spanyol berlayar ke Amerika dan ke Filipina, serta orang Portugal berlayar ke India sampai Asia (Reid, 2004:3). Oleh karena itu, pada umumnya bangsa-bangsa di Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan, kecuali Thailand (Lapian, 1975: 2). Sebagai salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia mengalami penjajahan mulai abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20. Pada kurun waktu tersebut, bangsa Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh bangsa kolonial pada berbagai dimensi.

Kurniawan, (2013:03) mengatakan bahwa kontak masyarakat Bumi Putra dengan kaum kolonialis Belanda tercermin di dalam dunia kesusastraan. Kasus-kasus semacam itu terdapat dalam dua periode kesusastraan, yakni dalam sastra lama dan sastra modern. Kesusastraan modern zaman kolonial, dicerminkan oleh sastrawan-sastrawan yang berasal dari kaum terpelajar hasil politik etis era penjajah Belanda. Sebagai contoh, sastrawan-sastrawan seperti, M. Yamin, Abdul Moeis, Marah Rusli, Soewarsih Djojopuspito, dan Sutan Takdir Alisjahbana, mereka merupakan para sastrawan yang mengenyam pendidikan Belanda. Pada sisi yang lain, pada khazanah sastra lama di Indonesia, gambaran kehidupan zaman kolonial

ditulis oleh pujangga-pujangga istana maupun penyalin naskah yang mengalami kontak dengan kehidupan zaman kolonial.

Hubungan antara penjajah dan terjajah merupakan hubungan yang bersifat dikotomis. Penjajah selalu diidentifikasi sebagai ras yang unggul, kuat, cerdas, dan superior, sedangkan dipihak lain, bangsa terjajah digambarkan (*stereotype*) sebagai bangsa yang lemah, bodoh, dan inferior (Kurniawan, 2013:05). Tipe-tipe hubungan tersebut juga didukung oleh tesis Said (1978:7) yang menyatakan hubungan antara penjajah dan terjajah ialah hubungan yang memiliki kekuatan dominasi, salah satunya adalah hubungan dalam berbagai derajat hegemoni yang kompleks.

Perkembangan selanjutnya menyatakan, terdapat sebuah konsep “Timur”, di timurkan tidak hanya karena ia didapati dalam keadaan “bersifat Timur”, tetapi juga dapat dijadikan Timur. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat ukuran-ukuran yang konseptual dan ideologis dalam mendefinisikan konsep geopolitik penjajah dan terjajah.

Hal yang perlu juga diketahui adalah konsep yang mendikotomi penjajah dan terjajah itu, melalui konfigurasi yang diciptakan oleh para penjajah. Artinya, seperangkat sistem yang digunakan untuk memetakan penjajah dan terjajah dikonstruksikan melalui prasangka, kepribadian, ukuran, paradigma, dan ego para penjajah, Oleh karena itu, hubungan dikotomi penjajah dan terjajah merupakan konsep geopolitik yang diciptakan oleh para penjajah untuk memisahkan ego penjajah dan terjajah yang disebut dengan *the other* (sang lain).

Kolonialisme diartikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli, oleh penduduk pendatang. Dalam membentuk permukiman baru, terjadi hubungan yang kompleks dan traumatik dalam sejarah antara penduduk lama dengan pendatang baru. Kadang-kadang, pembentukan koloni baru ini ditandai dengan usaha membubarkan paksa penduduk asli, dan membentuk kembali komunitas-komunitas yang sudah ada dengan melibatkan politik-politik perdagangan, penjarahan, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan (Loomba, 2003: 2). Sistem penguasaan ini umumnya ditandai dengan kewajiban daerahdaerah koloni membayar pajak atau upeti kepada kerajaan pusat.

Gagasan di atas kembali dipertajam oleh Loomba, (1998:4) yang menyatakan kolonialisme modern tidak hanya mengambil upeti, harta benda, dan kekayaan dari negara-negara jajahan, Akan tetapi kolonialisme juga mengubah struktur perekonomian mereka, menarik negara jajahan tersebut ke dalam hubungan yang kompleks dengan negara-negara induk, sehingga terjadi arus manusia dan sumber daya alam antara negara-negara koloni dengan negara kolonialnya.

Arus ini bekerja dua arah, meliputi bahan-bahan produksi, yaitu berupa bahan mentah, dan tenaga kerja diangkut untuk mendukung proses produksi negara induk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ke arah mana pun manusia dan material itu mengalir, keuntungan-keuntungannya selalu mengalir ke negara induk (kapitalis).

Kolonialisme dalam pandangan Loomba, (1998: 2) menolak adanya sebuah proses identik dalam berbagai dunia yang berbeda, tetapi di sisi lain, kolonialisme

tumbuh dan selalu terjadi hubungan-hubungan yang paling kompleks dan traumatis dalam sejarah manusia, antara para penduduk asli dengan para pendatang baru. Proses membentuk sebuah komunitas dalam negeri baru tentu berarti membubarkan atau membentuk kembali komunitas-komunitas yang sudah ada di negara jajahan. Selain itu terjadi praktik-praktik termasuk perdagangan, penjarahan, negosiasi, perang, pembunuhan, perbudakan, dan juga pemberontakan.

Studi sastra yang berkaitan dengan poskolonial, akan memainkan peran kunci dalam proses penyampaian nilai-nilai Barat kepada penduduk pribumi, mengonstruksi budaya Eropa sebagai kebudayaan unggul, dan sebagai ukuran untuk nilai-nilai manusia sehingga berguna untuk mempertahankan pemerintahan kolonial (Loomba, 1998:113).

Selain itu, kesusastran dan budaya sama sekali tidak antitesis terhadap lingkungan politis, tetapi justru sebagai sentral terhadapnya. Kesusastran bandingan mengakui adanya interaksi yang mendalam dari berbagai literatur dan budaya itu terorganisasi secara hirarki, dan asumsi sentralnya adalah Eropa berada di pusat dunia. Berkaitan dengan uraian di atas, kesusastran pada masa kolonial merupakan elemen penting, sehingga pantas untuk ditelaah dalam memahami wacana-wacana kolonial.

4. Subaltern dan Dominasi sebagai Pendekatan Kajian Sastra Poskolonial

Telaah teks-teks kesastraan lazimnya memergunakan pendekatan atau berdasarkan teori-teori tertentu, seiring dengan sejarah teori kesusastran yang telah muncul dan berkembang sedemikian panjang sejak zaman Yunani Klasik yang

memunculkan tokoh-tokoh semacam Plato dan Aristoteles (Nurgiyantoro, 2013:55). Gandhi (1998:179) menyampaikan bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan mengalami keterkaitan sering dengan berkembangnya suatu era, maka pengetahuan juga punya perhatian kritis terhadap suasana dan konteks sosial yang berlangsung.

Salah satu fokus kajian perkembangan ilmu pengetahuan adalah poskolonialisme. Tema-tema poskolonial punya pengaruh terhadap perhatian-perhatian kritis teori sastra poskolonial. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa teori poskolonial sebagai bagian dari pendekatan kajian kesastraan, adalah bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan pola fikir yang bersifat global, yang salah satunya adalah dipengaruhi oleh konteks sosial.

Pada masa Yunani Klasik juga telah memunculkan teks-teks kesastraan (yang umumnya berupa naskah drama) dengan para sastrawan seperti Sophocles (dengan karya seperti *Oedipus the King*, *Oedipus at Colonus*, *Antigone*), Homerus (*Illias*, *odyssey* atau *Odysseus*, *Ulysses*), Aeschylus (*Oresteia* dan *Agamemon*), dan Euripedes (*Medeia* dan *Phaidra*) (Nurgiyantoro, 2013:55).

Seiring dengan berkembangnya semua itu, maka di periode dasawarsa terakhir, poskolonialisme telah memainkan peran khusus dengan teori-teori semacam postrukturalisme, psikonalisis, dan feminisme sebagai sebuah wacana kritis utama ilmu-ilmu humaniaora (Gandhi, 1998:xxi). Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu sastra dari masa ke masa mengalami perkembangan yang signifikan, sebagai konsekuensi dari penggunaannya yang

berbeda, dan kadang-kadang dibuktikan dengan munculnya interdisipliner keilmuan. Bentuk pemikiran tersebut telah menghasilkan sebuah korpus yang penting mengenai tulisan akademik dan beragam macam penelitian.

Poskolonialisme dikaitkan antara totalitas dan struktur politik, sedangkan pada sisi lain, bersinggungan dengan fragmen politik imperealisme. Fenomena pemikiran seperti ini merupakan suatu cara dalam memberikan sugesti, bahwa teori poskolonial ditempatkan di dalam celah antara marxisme dan postrukturalisme (Gandhi, 1998:211).

Loomba (1998:91) mengemukakan bahwa objektivitas bukan satu-satunya dasar yang dipakai untuk mengkalim kepolosan ideologis dan politik. Studi-studi literer humanis sejak lama telah melawan gagasan bahwa literatur (atau paling tidak literatur yang baik) tidak ada kaitannya dengan perpolitikan, atas dasar-dasar bahwa yang pertama itu terlalu subjektif, individual, dan personal, ataupun terlalu universal dan transenden untuk dipengaruhi.

Hubungan antara kolonialisme dan literatur tidak dibahas dengan kritik literer, sebab situasinya tampak cepat, serta banyak dari para penganalisis sastra poskolonial berasal dari dunia pendidikan, atau afisiliasi profesional dengan studi-studi sastra (Loomba, 1998:91). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa dalam studi-studi sastra, analisis-nalisis atas kolonialisme, ras, gender, masih dianggap sebagai topik yang relevan untuk diteliti, serta tidak banyak mengubah pengajaran, serta riset dalam disiplin ilmu selanjutnya.

Hubungan antara sastra dan kolonialisme akhir-akhir ini seolah memancing penilaian yang serius atas masing-masing pendekatan kajiannya, salah satunya adalah peran penting literatur dalam wacana-wacana kolonial dan antikolonial selalu menarik untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam serta menyeluruh, tak terkecuali studi sastra (literatur) yang ada di Indonesia.

Kajian sastra poskolonial dalam perkembangan teks sastra Indonesia, merupakan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Taufik (2010:02) mengemukakan bahwa fenomena poskolonial itu melingkupi seluruh dimensi pola hubungan yang terkonstruksi oleh negara yang pernah mengalami masa kolonisasi, serta efek-efek (baik fisik maupun psikologis) yang ditimbulkannya. Sebagai teks sastra poskolonial, sastra Indonesia sarat muatan poskolonial itu, oleh sebab itu, tidak jarang pengaruh poskolonialitas itu sangat terasa dalam perkembangan sastra Indonesia. Bahkan, muatan dan warna poskolonialitas itu mampu memberi daya tersendiri bagi karya sastra Indonesia.

Karya sastra Indonesia secara umum setidaknya dapat diamati dari awal pertumbuhan sastra Indonesia pada era 1920-an sampai sekarang. Sebagai sastra modern, sastra Indonesia pada awal pertumbuhannya sudah bersentuhan dengan warna poskolonialitas itu. Beberapa karya sastra yang diterbitkan di Balai Pustaka, maupun di luar Balai Pustaka tidak dapat dipungkiri menampilkan hal demikian. Sentuhan dan warna poskolonial terasa sekali. Karya sastra poskolonial menarik untuk diamati karena menjadi sebuah medan pertarungan antara pengarang dengan dunia di luar karya sastra yang dikonstruksinya.

Kajian poskolonial yang dilakukan lebih berfokus pada masalah dominasi-subordinasi. Salah satu hal yang cukup menarik untuk dicermati dalam perkembangan teks sastra poskolonial terkait dengan pola hubungan subalternitas dan dominasi-subordinasi itu adalah dimainkannya ke dalam sebuah dimensi karya untuk mendapatkan daya ekspresi imajinatif dalam teks sastra. Teks sastra dalam konteks demikian menjadi media untuk mengomunikasikan daya ekspresi imajinatif itu, sekaligus mengeksplorasikan muatan-muatan substansial yang terdapat di dalamnya yang penuh relasi kuasa imperealisme.

Penting untuk dipahami bahwa relasi kuasa senantiasa direproduksi dalam suatu jaringan diskursif dalam segala hal, tempat seseorang yang “tahu” mendominasi yang “tidak tahu” (Gandhi, 1998:101). Terkait dengan jejaring diskursif kekuasaan tersebut, tubuh dalam konteks teks sastra poskolonial menjadi begitu memiliki daya urgensi dalam rangka menyerap energi pembaca untuk memerhatikan secara sepenuhnya peristiwa kekuasaan yang terjadi (Ya Liou, 2011:02).

Kajian poskolonial yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup seluruh kebudayaan yang pernah mengalami kekuasaan imperial dari awal kolonisasi hingga kurun waktu sekarang (Ashcroft, 1998: xxii). Pandangan teoretik ini, mengistilahkan poskolonial sekaligus mencakup waktu dan tempat terjadinya kolonialisasi. Berpijak dari perspektif ini, kesusastraan poskolonial adalah karya sastra yang ada atau eksis pada masa kolonial atau imperialisasi yang terwujud dalam realitas penjajahan sampai sekarang, yang mengandaikan konstruksi

kesusastraannya pada masalah hubungan antara “yang mengkolonisasi” dan “yang dikolonisasi.”

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat dikatakan bahwa studi sastra poskolonial khususnya subaltern dan dominasi kolonial, menjadi persoalan yang sangat penting dan relevan untuk dibahas dalam studi sastra poskolonial, terutama Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung juga ikut mengalami dampak kolonialisme, baik dari bangsa Eropa maupun Jepang.

Kritik teoritik sastra poskolonial bisa dipadukan dengan percampuran, atau pertemuan ideologis yang terjadi pada masyarakat, terutama gagasan tentang sastra etnik dan perkembangan sastra secara nasional. Terjadinya kolaborasi keilmuan ini, juga dapat memperkaya dan meningkatkan nilai-nilai dan adat kebiasaan masa lalu, dan dapat memungkinkan berbagai tradisi untuk diubah atau dikembangkan kemudian membentuk tradisi baru.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berfungsi untuk menggambarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sesuai sehingga dapat dijadikan pijakan bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam hal penyempurnaan kekurangan penelitian selanjutnya. Kesempatan kali ini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai parameter atas penelitian yang disajikan. Peneliti berhasil menghimpun tujuh hasil penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hill (2016) *A Subaltern Studies Reader, 1986-1995 / Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and*

Society, hasil dari penelitian tersebut penelitian ini adalah beberapa masyarakat di Asia yang mengalami subaltern, misalnya di daerah India, bahwa kecenderungan masyarakat yang terkena subaltern mengalami gagal mental dan pengasingan, sebab mereka mengalami penyesuaian dari bangsa penjajah.

Penelitian ini berupa pandangan garis besar terhadap studi subaltern yang terjadi di Asia secara umum dan India secara khusus, selain itu, dalam penelitian ini juga tidak secara khusus mengarah kepada subaltern dan dominasi dalam kaitannya pada negara yang terkena dampak kolonialisme yang berlangsung sangat lama. Studi tersebut juga tidak melibatkan teks-teks sastra sebagai bagian dari medan analisis konseptual sebagai pandangan yang relevan untuk dibahas dan diteliti.

Kedua, penelitian Ross (2016) yang berjudul *South African history and subaltern historiography: Ideas for a radical history of white folk*, penelitian tersebut membahas tentang sejarah dan dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme yang terjadi di Afrika Selatan, penelitian tersebut melibatkan pandangan subaltern dalam studi budaya yang dilakukan oleh bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit hitam. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Afrika mengalami subaltern secara fisik karena sebagian besar dari mereka dimanfaatkan oleh para penjajah untuk bekerja.

Penelitian ini tidak mengafisiasi karya sastra sebagai medan penelitian yang relevan, penelitian ini juga tidak mendeskripsikan unsur dominasi yang kuat yang dilakukan oleh para penjajah. Unsur subaltern belum terfokus pada objek yang

secara khusus dibahas dalam studi budaya kolonialisme. Oleh sebab itu peneliti menganggap kedua penelitian di atas belum memenuhi ekspektasi peneliti selanjutnya disebabkan oleh kurang mendetailnya bahasan yang dilakukan mengenai studi subaltern.

Ketiga, penelitian Gairola (2017) yang berjudul *Burning with shame: Desire and south asian patriarchy, from gayatri spivak's "can the subaltern speak?"* secara khusus penelitian pada jurnal ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya budaya patriarki yang bawa oleh bangsa kolonial. Penelitian ini menggunakan teori dari Spivak tentang kajian subalten, namun pada penelitian ini subaltern yang dimaksudkan adalah terkhusus gender yang diakibatkan oleh pengaruh kolonialisme. Studi subaltern sendiri cakupannya tidak hanya sekadar gender, melainkan juga segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh kalangan penjajah kepada masyarakat pribumi, baik itu berupa kekerasan fisik dan psikis, subordinasi, pengasingan, dan segala bentuk penindasan lainnya.

Keempat, penelitian Bharadwaj (2013) yang berjudul *Ethic of consensibility, subaltern ethicality: The Clinical Application of Embryonic Stem Cells in India*, pada penelitian ini dibahas mengenai etika-etika yang dilakukan oleh kaum subaltern di India, penelitian ini berfokus pada etnografi, membahas mengenai etnis-etnis yang ada di India yang terkena subaltern. Penelitian ini juga membahas dampak yang ditimbulkan dari subaltern seperti dampak kekerasan yang sifatnya laten, seperti adanya gangguan kepada fisik manusia dampak subaltern yang dilakukan para penjajah.

Kelima, penelitian Setiawan (2013), dengan judul penelitian *Subaltern, Politik Etnis, dan Hegemoni dalam perspektif Spivak*. persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pisau bedah subaltern menurut Gayatri C. Spivak, selaku yang mengistilahkan kaum tertindas era kolonisasi. Hasil penelitian ini secara khusus berupa jabaran teori subaltern versi Spivak, dan juga beberapa peran politik hegemoni yang terjadi dalam suatu negara yang terkena dampak kolonialisme.

Keenam, penelitian Manbachi (2016) yang berjudul *Reviews: Imagining Iran: The Tragedy of Subaltern Nationalism*, pada jurnal ini dibahas mengenai identitas nasional negara Iran yang berkaitan dengan bahasa dan subaltern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang ekuivalen antara subaltern yang dilakukan penjajah dengan perkembangan dan asimilasi bahasa yang terjadi di Iran. Hubungannya dengan subaltern dalam penelitian ini adalah adanya kaum elit penjajah yang menindas kepada kaum pribumi Iran, yang mayoritas adalah bangsa Persia.

Wacana subaltern dalam penelitian ini berupaya menjalankan sistem kolonialisme yang diskursif. Adanya unsur politik antara penguasa lokal dan para kolonial untuk menindas kaum pribumi yang lemah, dan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal tidak berhasil dilakukan. Diasumsikan oleh peneliti, bahwa penelitian ini tidak secara spesifik menyebutkan kalangan yang terkena dampak subaltern yang dilakukan oleh para koloni. Juga penelitian ini menggambarkan secara jelas adanya dominasi penguasa yang ditunjukkan dalam objek penelitian.

Ketujuh, penelitian Barreto (2015) yang berjudul *Human rights and emotions from the perspective of the colonised: Anthropofagi, legal surrealism and subaltern studies*. Penelitian ini membahas mengenai studi subaltern yang telah dikembangkan di beberapa wawasan keilmuan, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang tidak seimbang antara kolonialisme, hak asasi manusia, dan penderitaan rakyat pribumi.

Jurnal ini berisikan kritik atas alasan dalam konsep pemahaman Eropa. Kritik saat ini muncul dari sudut pandang yang berbeda, atau tepatnya, dari sejarah yang berbeda dan lokasi geopolitik antara pemahaman Eropa dan pemahaman non-Eropa. Penelitian ini membahas beberapa hak asasi manusia atas penjarahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa kepada bangsa Amerika Latin.

Sebuah kritik dalam jurnal ini juga disampaikan terhadap sejumlah orang, mengenai teori yang dibuat di Eropa dalam pandangan dunia ketiga, yang merupakan bagian dari upaya untuk membebaskan diri dari pengawasan pemikiran dan budaya Eropa. Sebagai orang Eropa modern model pemikiran seperti ini akan terus menjadi alat dalam proses dominasi dan akulturasi dunia terjajah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara hak asasi manusia dengan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kolonialisme juga berakibat hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat pribumi karena secara langsung atau tidak langsung mereka mengalami kekerasan, penjarahan, dan beberapa pelanggaran kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan ketujuh penelitian di atas, diasumsikan oleh peneliti, bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya belum banyak memuaskan dan memenuhi ekspektasi penelitian, oleh sebab itu, penelitian kali ini mencoba untuk mengobinasikan secara utuh nilai subalten dan dominasi yang dilakukan oleh penjajah terhadap masyarakat jajahan secara lebih kompleks, peneliti juga beranggapan, bahwa ada hubungan yang ekuevalen dan selalu terikat antara subalten dan kekuatan dominasi, sebab keduanya merupakan ‘tindakan’ dan ‘dampak’ yang ditimbulkan dari perlakuan penjajah terhadap pribumi.

Penelitian kali ini, juga melibatkan empat karya sastra yang bercorak kolonialisme, terutama aspek subaltern dan dominasi. Empat karya fiksi dipilih dengan pengarang yang berbeda, juga menjadi keunggulan dalam penelitian ini, terutama upaya membandingkan yang terjadi pada masing-masing penceritaan yang bercorak kolonialisme, oleh sebab itu, harapan akan penelitian ini ialah dapat mengakomodir segala kepentingan yang berkaitan dengan persoalan kolonialisme dan poskolonialisme, terutama isu-isu subaltern dan domiasi yang dilakukan oleh penjajah kepada masyarakat jajahan.

C. Alur Fikir

